



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**"STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DAN
PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI"**

NAMA : Drs. EDY SUPIYANTA, M.Si

N I P : 19630102 198703 1 001

KELAS : B

N D H : 11

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat Berbasis Aplikasi

Mentor : Dr. Nata Irawan

Coach : Drs. Domoe Abdie, M.Si

Terwujudnya Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, yang bertemakan tentang Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pelayanan Masyarakat Berbasis Aplikasi, merupakan salah satu tujuan jangka pendek dari Proyek Perubahan ini. Melalui kerjasama dan komunikasi yang dibangun bersama *stakeholder* juga pemangku kepentingan lainnya memberikan kekuatan kepada penulis sebagai *project leader* untuk dapat mengembangkan tujuan jangka menengah dan jangka panjang dari konsep ini dalam upaya terus menerus untuk meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat berbasis aplikasi. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tuntutan masyarakat ke depan maka Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, maka diharapkan Desa-Desa dapat mewujudkan Administrasi Pemerintahan Desa yang tertib. Adapun yang dimaksud Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi, mengenai pemerintahan desa pada buku register. Sedangkan ruang lingkupnya meliputi Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Lainnya. Sedangkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat merupakan semangat pelayanan dari Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang tujuannya antara lain:

- Mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya

- Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Desa

Namun demikian kondisi riil di lapangan, masih banyaknya Desa-desa yang kurang tertib dalam hal administrasi Pemerintahan Desa dan masih lambatnya pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan belum pahamiannya aparatur Desa tentang Permendagri No. 47 Tahun 2016 dan Permendagri No. 2 Tahun 2017 serta belum terlatihnya aparatur pemerintahan desa.

Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang pemerintahan desa bagi kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa. Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelatihan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan pelatihan di bidang kelembagaan dan kerjasama desa, serta keuangan dan aset desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Terkait permasalahan kurang tertibnya administrasi Pemerintahan Desa serta masih lambatnya pelayanan kepada masyarakat, maka titik fokus solusinya adalah perlunya peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dengan pelatihan serta didukung dengan pemanfaatan teknologi aplikasi dalam pelaksanaannya dan ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang dan secara teknis dilakukan oleh Bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Terlaksanakannya proyek perubahan ini didukung oleh tim efektif dan *stakeholder* dari luar serta anggaran yang tersedia di Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang.